

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan media ilmiah kebijakan hukum berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan hukum, wacana ilmiah dan artikel, terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34/E/KPT/2018 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018, menetapkan bahwa Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum mendapatkan peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Peringkat 2 (dua) atau Sinta-2 (S2).

Penasehat : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pengarah : 1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
2. Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM
5. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

**Ketua Dewan Redaksi
(Editor)** : Taufik H. Simatupang, S.H., M.H.

**Anggota Dewan Redaksi
(Section Editor)** : 1. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.
2. Edward James Sinaga, S.Si., M.H.
3. Nizar Apriansyah, S.E., M.H.
4. Ahmad Jazuli, S.Ag., M.H.
5. Haryono, S.Sos, M.H.
6. Imam Lukito, S.T., M.H.
7. Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, S.S., M.Si.

Redaksi Pelaksana : Fitriyani, S.H., M.Si.

Sekretaris : 1. M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.
2. Asmadi, S.H.

Tata Usaha : 1. Lindung Budi Mulyawan, S.H.
2. B. Lora Christyanti, S.IP.

**Desain Grafis
dan Teknologi Informasi** : 1. Machyudhie, S.T. (Teknologi Informasi)
2. Agus Priyatna, S.Kom. (Desain Layout)
3. Harysandy Permana, S.Kom. (Teknologi Informasi)

Alih Bahasa : Harry Fonte Sugiarto
(*Interlingua Translation Centre*)

Alamat Redaksi:

Jalan HR Rasuna Said Kavling 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. 021-2525015 ext. 512 /514 Fax. 021-2522954

balitbangkumham@gmail.com
ejournalkebijakan@gmail.com

Kami mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah menelaah naskah sehingga dapat diterbitkan.

1. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
(Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, Hukum Ekonomi)

2. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
(Hukum Internasional, Hukum Kekayaan Intelektual)

3. M. Ramdan Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D.
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
(Hukum Administrasi Negara)

4. Dr. Ir. Edy Santoso, S.T., M.ITM., M.H.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Hukum dan HAM
(Kebijakan Sumber Daya Manusia)

5. Dr. Hadi Supratikta, M.M.
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri
(Otonomi Daerah, Hukum Pemerintahan)

DAFTAR ISI

HASIL PENELITIAN (*ARTICLES*)

1. Studi Pendahuluan Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Hukum di Kementerian Hukum dan HAM RI 1-14
Taufik H. Simatupang
2. Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana 15-30
Azwad Rachmat Hambali
3. Aktualisasi Tata Nilai 'PASTI' dalam Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi Serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani..... 31-50
Edward James Sinaga
4. Urgensi dan Inovasi dalam Pembaharuan Peraturan Teknis Mengenai Paspor Biasa..... 51-68
Reza Riansyah Abdullah
5. Analisa Kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bandung 69-84
Trisapto Agung Nugroho
6. Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian dari Penegakan Hukum 85-98
Victorio Hariara Situmorang

TINJAUAN HUKUM (*REVIEW*)

7. Politik Hukum Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta..... 99-122
Duwi Handoko

HALAMAN KOSONG

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum kembali terbit menemui para pembacanya. Salawat serta salam tak lupa pula disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah merubah cakrawala berpikir umat manusia dari pemikiran tradisional mistis ke era rasionalitas ilmiah modern.

Eksistensi dan keberkaraan suatu penerbitan jurnal ilmiah di berbagai lembaga Litbang selalu menjadi masalah sekaligus tantangan bagi setiap pengelolanya, mulai dari minimnya anggaran, kurangnya SDM, minimnya artikel/tulisan masuk dan penyesuaian ketentuan penulisan ilmiah yang disyaratkan oleh instansi pembina.

Pada terbitan Volume 13 Nomor 1 Bulan Maret 2019 ini, kami memuat hasil-hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia, diantaranya di bidang Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, Pemasyarakatan, Hukum dan Peradilan, serta Keimigrasian yang terbit kali ini. Naskah tulisan yang masuk telah diseleksi secara ketat oleh Dewan Redaksi serta melalui penelaahan dan penilaian dari Mitra Bestari. Oleh karena itu tidak semua tulisan yang masuk dapat dimuat pada Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum terbitan ini. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kualitas substansi tiap-tiap tulisan, sehingga mutu dan kualitas tulisan tetap terjaga sesuai analisis dan pembahasannya. Dari hasil seleksi dimaksud kami memuat tulisan berupa hasil penelitian yang ditulis oleh Peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM serta dari Institusi / Akademisi dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada para Mitra Bestari yang telah melakukan penelaahan, analisis dan penilaian atas kelayakan tulisan untuk dimuat di Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada seluruh penulis yang telah berkenan menyumbangkan artikel/tulisannya.

Akhirnya, kami berharap semua hasil penelitian dan tinjauan hukum yang dimuat dalam jurnal ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan dan pembangunan hukum dan kebijakan di Indonesia. Kami pun terbuka dalam menerima kritik dan saran konstruktif sebagai perbaikan dan penyempurnaan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum di masa yang akan mendatang.

Selamat Membaca,

REDAKSI

HALAMAN KOSONG

Volume 13, Nomor 1, Maret 2019

**p-ISSN 1978 - 2292
e-ISSN 2579 - 7425**

JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

HALAMAN KOSONG

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Taufik H. Simatupang (The Agency of Research and Development of Law and Human Rights, the Ministry of Law and Human Rights)

Preliminary Research for The Establishment of Functional Position of Legal Analysis in The Ministry of Law and Human Rights

Scientific Journal of Law Policy, Volume 13, Number 1, March 2019

One of the tasks of the National Law Development Agency is to carry out legal analysis and evaluation, so that the laws and regulation are still relevant to the needs of the state. Therefore, we need a legal analyst who is able to analyze and evaluate the legislation. The problem in this research is the readiness of the supervisory agency in encouraging the legal analyst functional officials. The purpose of this research is to find out and analyze the readiness of the development agency in the development of the Legal Analyst Functional Position. The research used a normative judicial research method with a qualitative approach. The data used are secondary data collected based on literature search and primary data collected in a limited way by means of interviews with informants. The research results indicate that the National Laws Development Agency has prepared some supporting data documents, despite of some other documents remaining unprepared. Development of employees in any positions including those in the functional positions has been the development that relates to the employee career and performance. Therefore, the supervisory agency is expected to immediately prepare the necessary documents, as may be recommended by this research.

Keywords: *preliminary research, functional position, legal analyst, ministry of law and human rights republic of Indonesia*

Azwad Rachmat Hambali (The School of Law of Indonesian Muslim University)

Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System

Scientific Journal of Law Policy, Volume 13, Number 1, March 2019

This research aims to analyze the diversion policy in restorative justice under the Criminal Justice System for Children. The research has been descriptive of normative legal research type related to the application of diversion policy in the restorative justice under the criminal justice system for children. The research results show that the application of diversion policy in restorative justice under the diversion policy for children in conflict with the law under the juvenile justice system is an implementation of the restorative justice system in providing justice and legal protection to children in conflict with the law without necessarily impairing the children' responsibilities for their delinquency. Diversion is not reconciliation between the children in conflict with the law and victims or their families but it should be a form of punishment against the children in conflict with the law in a non-formal manner. Recommendations in this research are, law enforcers in performing their tasks of investigation, prosecution, investigation and determination of the case by the court should prioritize the implementation of diversion policy as an alternative for the imprisonment or jail terms. Massive socialization of this diversion policy to the community is highly required. The government should provide facilities and infrastructure for the diversion policy in order to guarantee protection for children.

Keywords: *diversion; restorative justice; child crime.*

**The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge**

Edward James Sinaga (Faculty of Law, University of Muslim Indonesia)

Actualization of the 'PASTI' Value in Creating Corruption-Free and Clean and Serving Bureaucratic Areas

Scientific Journal of Law Policy, Volume 13, Number 1, March 2019

The idea of corruption-free areas staged by the Ministry of Law and Human Rights had its start since 2004 until now. However, from 814 work units, there is only one work unit that has been labeled the Corruption-free Area, the Semarang Women's Correctional Institute. To accelerate corruption eradication and prevention, a mental revolution movement "Ayo Kerja, Kami PASTI" or literally "Let's get work, we are PASTI" has been created. For such purpose the actualization of certainty value of the word "PASTI" should be analyzed when performing the tasks and functions of the work unit using a qualitative approach. Following the declaration of the certainty value of the word 'PASTI', attitudes and actions should have differed from that time before such declaration, such as attitude toward time punctuality. Compliance with work hours regulation should be higher and the jobs done in a manner that is more compliance with the laws and regulations. The work unit has applied all 'laws and regulations of discipline' / 'code of ethics' / 'code of conduct' to the employees appointed by the organization who have not yet made innovations that fit the characteristics of the work unit. Some work units have not yet had their complete Standard Operating Procedures and lacked of supporting data in their activity. Also, there has been no special support in the forms of budgets and rewards for the work units that have been labeled a corruption-free area.

Keywords: actualization; values; corruption-free areas.

Reza Riansyah Abdullah (Special Class I Non-Immigration Check Immigration Office in South Jakarta)

Urgency and Innovation in The Renewal of Technical Regulations on Common Passport

Scientific Journal of Law Policy, Volume 13, Number 1, March 2019

Passport issuance is one of the core services of the Directorate General of Immigration mandated by the Immigration Law. The development and dynamics of this passport issuance service require some changes to the legal ground of the technical regulations on passports. Trainings on passports have raised questions on the urgency of renewing the technical regulations. The research objective is to find out whether these developments have been supported by the basic implementation laws and regulations or whether the technical laws and regulations need to be partially renewed by innovative making of laws. By using the qualitative prescriptive method, hermeneutic construction is conducted by interpreting texts of technical regulations related to passports and their real implementation. This paper presents a rich dialectical result on the innovation, the developing actual issues and mechanisms for providing passport services based on experience and interaction of the trainees. Hence the renewal of the technical regulations should not only become an urgency but it may also accommodate every dynamic aspects of the passport issuance service. The recommendation has been synchronization between systemic implementation and the written laws and regulations with innovative revision of the technical laws and regulation by including the advantageous ideas from all immigration regional offices during the process of renewal of the technical regulations on passports.

Keywords: Passport Services; Dialectics Training; Renewal.

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Trisapto Wahyudi Agung Nugroho (The Agency of Research and Development of Law and Human Rights, the Ministry of Law and Human Rights)

Analysis on The Needs of Counselor in Bandung Correctional Institution

Scientific Journal of Law Policy, Volume 13, Number 1, March 2019

Too wide working area of correctional institutions, not all regencies / cities have their own jail, there are only 71 correctional institutions in Indonesia, with lack of Counselors (only 613 counselors for all such correctional institutions), inproportional distribution of 11,708 community researches, have been issues that prevent the good services delivery and correctional coaching. The purpose of this research is to determine how many Correctional Institutions and Counselors are required based on the Regulation of the Law and Human Rights Minister No. 15 of 2015 regarding Guidelines for Assessment of Reclassification of Technical Executive Units of Correctional Institution and to find out the total number of Correctional Counselors at the Bandung Class I Correctional Institution based on Regulation of the Law and Human Rights Minister No. 7/2017 regarding Guidelines for Calculating Correctional Counselors Functional Positions. The method used in this research is descriptive method with a qualitative approach. The data used are primary data from interviews with informants at the Directorate General of Corrections and the Bandung Class I Correctional Institutions and secondary data based on the searches on the site <http://smslap.ditjenpas.go.id/>, literature, articles and journals as well as applicable laws and regulations. The data are processed and analyzed by qualitative descriptive analysis techniques. The conclusion of this research is that Class I Correctional Institution of Bandung has considered the volume of its requirements and distribution based on the ratio between the total number of clients and availability of cases to the functional needs of Community Counselors, being 83.51%. While the distribution of Correctional Counselors has been 15 First Level counselors; 47 junior counselors and 5 intermediate Counselors.

Keywords: *correctional institutions; community advisor; research community.*

**The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge**

Victorio Haria ABR Situmorang (The Agency of Research and Development of Law and Human Rights, the Ministry of Law and Human Rights)

Correctional Institution as Part of Law Enforcement

Scientific Journal of Law Policy, Volume 13, Number 1, March 2019

Article 1 point 3 of the Law No. 12 of 1995 regarding Corrections provides for "the Correctional Institutions, hereinafter referred to as LAPAS, are places to correct the attitudes of the convicts and inmates. While article 1 point 2 of the same laws provides for "Correctional System is a composition of orientation and restrictions as well as the methods of Correcting the attitudes of the inmates so that they will be aware of their mistakes, improve themselves, and not repeating their offenses and make them acceptable to the community, can actively play a role in development, and may appropriately live as a good and responsible citizen". Based on the laws and regulations above, this research would like to give a message that Corrections are part of the legal system in Indonesia, that needs attentions of the government of the Republic of Indonesia. The research methodology is qualitative approach, the nature of the research is descriptive with secondary data sources. The research results conclude that the correctional system that is currently in place, still has many shortcomings on various aspects. Both in terms of human resources and in terms of facilities. Inappropriate ratio between inmates and correctional officers is one of the conditions that may be considered an obstacle in the implementation of an ideal penal system. Which of course has also become an obstacle in law enforcement in Indonesia

Keywords: *correctional institution; human resources; law enforcement.*

Duwi Handoko (Persada Bunda High School of Law Science)

Legal Politics of Criminalization and Decriminalization in Copyright

Scientific Journal of Law Policy, Volume 13, Number 1, March 2019

The substance of the Indonesian Copyright Law covers the Private Law and Public Law aspects. In this paper, only the public law aspects are reviewed, specifically related to criminalization and decriminalization. This research is based on curiosity in revealing the ground for criminalization and decriminalization ideas to achieve goals, i.e. one must know the limits of an action that may be classified as a crime or nor. The approach used in this research is qualitative approach with data collection tool in the form of library studies. The criminalization and decriminalization in copyright is part of the Indonesian Criminal Law Politics. The rationale for the criminalization process may be viewed from two aspects, the pure crime and non-pure crime. The rationale for the decriminalization process is that the acts of copyright infringement should not be charged under the criminal laws if such copyright has nothing to do with the commercial interest. The government should continuously provide education to the creators or copyright holder in dealing with the requirements of police reporting in regard to the copyright infringement. The creator should keep on producing works and should be made understand that not all copyright infringement may be charged under the penal code and not all such culprits may be classified as a criminal. Since there have been some infringement are legalized.

Keywords: *copyright; legal politics; criminal law; criminalization; decriminalization.*

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

Taufik H. Simatupang (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)

Studi Pendahuluan Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Hukum di Kementerian Hukum dan HAM RI

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 13, Nomor 1, Maret 2019

Salah satu tugas Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah melaksanakan analisa dan evaluasi hukum, agar peraturan perundang-undangan tetap relevan dengan kebutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan seorang analis hukum yang mampu melakukan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kesiapan instansi pembina dalam pelaksanaan pembinaan pejabat fungsional analis hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kesiapan instansi pembina dalam pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan berdasarkan penelusuran literatur dan data primer yang dikumpulkan secara terbatas melalui wawancara dengan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional sudah mempersiapkan sebagian dokumen data pendukung, meskipun sebagian dokumen yang lain belum. Pembinaan pegawai dalam jabatan apapun termasuk jabatan fungsional adalah pembinaan yang menyangkut sistem karier dan prestasi kerja pegawai. Oleh karena itu instansi pembina diharapkan segera menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, sebagaimana disarankan dalam hasil penelitian ini.

Kata kunci: studi pendahuluan; jabatan fungsional: analis hukum: Kementerian Hukum dan HAM R.I.

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

Azward Rachmat Hambali (Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia)

Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 13, Nomor 1, Maret 2019

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diversi dalam *restorative justice* pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan tipe penelitian hukum normatif yang terkait penerapan diversi dalam keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi dalam keadilan restoratif pada sistem penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak, merupakan implementasi sistem dalam keadilan restoratif untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara nonformal. Rekomendasi dalam penelitian ini, aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan penentuan putusan perkara pada sidang pengadilan hendaknya mengutamakan penerapan diversi sebagai salah satu alternatif dari penerapan pidana penjara. Perlu dilakukan sosialisasi secara masif mengenai diversi kepada masyarakat. Hendaknya pemerintah menyediakan sarana dan prasarana diversi dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada anak.

Kata kunci: diversi; keadilan restoratif; pidana anak.

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

Edward James Sinaga (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)

Aktualisasi Tata Nilai 'PASTI' dalam Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 13, Nomor 1, Maret 2019

Pencanangan wilayah bebas dari korupsi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dimulai sejak tahun 2004 sampai sekarang. Namun, dari 814 unit kerja hanya satu unit kerja yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2016, yaitu Lembaga Masyarakat Perempuan Semarang. Kemudian, pada tahun 2018 menjadi 11 satuan kerja yang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Untuk percepatan pemberantasan dan pencegahan korupsi dilakukan gerakan revolusi mental "Ayo Kerja, Kami PASTI". Untuk itu dianalisis Aktualisasi Tata Nilai 'PASTI' dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan kerja dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah pendeklarasian Tata Nilai 'PASTI' sikap dan tindakan yang dilakukan berbeda dengan sebelum pendeklarasian, seperti sikap tepat waktu. Ketaatan terhadap jam masuk kerja dan jam keluar kerja sudah lebih tepat waktu, serta penyelesaian pekerjaan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Unit kerja telah mengimplementasikan seluruh 'aturan disiplin'/'kode etik'/'kode perilaku' pegawai yang ditetapkan organisasi namun belum membuat inovasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. Masih ada unit kerja yang belum melengkapi Standar Operasi Prosedur dan masih kurangnya data pendukung di setiap kegiatan yang dilakukan. Serta belum adanya dukungan khusus anggaran dan *reward* bagi unit kerja penerima predikat wilayah bebas dari korupsi.

Kata kunci: aktualisasi; tata nilai; wilayah bebas dari korupsi.

Reza Riansyah Abdullah (Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan)

Urgensi dan Inovasi dalam Pembaharuan Peraturan Teknis Mengenai Paspor Biasa

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 13, Nomor 1, Maret 2019

Pelayanan paspor merupakan salah satu inti pelayanan Direktorat Jenderal Imigrasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Keimigrasian. Perkembangan dan dinamika pelayanan paspor, menuntut adanya perubahan secara parsial terhadap dasar hukum peraturan teknis mengenai paspor. Pelatihan mengenai paspor menumbuhkan pertanyaan yang menunjukkan urgensi pembaharuan peraturan teknis tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana berbagai perkembangan tersebut belum ditunjang oleh dasar hukum pelaksanaannya sehingga perlu dilakukan pembaharuan hukum peraturan teknisnya secara parsial dengan melakukan inovasi pembentukan hukum. Dengan menggunakan metode preskriptif secara kualitatif, konstruksi hermeneutik dilakukan menggunakan interpretasi teks peraturan teknis mengenai paspor dan implementasinya secara nyata. Tulisan ini memaparkan hasil dialektika yang kaya mengenai inovasi, isu aktual yang berkembang dan mekanisme pelaksanaan pelayanan paspor berdasarkan pengalaman dan interaksi antar peserta pelatihan. Sehingga pembaharuan peraturan teknis tidak hanya menjadi suatu urgensi melainkan juga mengakomodir kebutuhan pelayanan paspor yang sangat dinamis. Maka saran yang diberikan adalah sinkronisasi antara pelaksanaan secara kesisteman dengan aturan tertulis melalui revisi peraturan teknis secara inovatif dengan mengikutsertakan ide-ide unggul dari berbagai wilayah kantor imigrasi dalam proses pembaharuan peraturan teknis mengenai paspor.

Kata kunci: pelayanan paspor; dialektika pelatihan; pembaharuan.

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

Trisapto Wahyudi Agung Nugroho (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)

Analisa Kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Bandung

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 13, Nomor 1, Maret 2019

Wilayah kerja Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang terlalu luas, belum dibangunnya Bapas di setiap kabupaten/kota, baru 71 satuan kerja Bapas, belum memadainya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (613), distribusi yang belum proporsional dengan 11.708 penelitian masyarakat, menjadi permasalahan yang menghambat pelaksanaan pelayanan dan pembinaan pemasyarakatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebutuhan Balai Pemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Kelas Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan mengetahui jumlah Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghitungan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan ada primer yaitu wawancara dengan informan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung sedangkan data sekunder berdasarkan penelusuran pada situs <http://smslap.ditjenpas.go.id/>, literatur, artikel dan jurnal serta peraturan perundang-undangan. Data diolah dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Bapas Kelas I Bandung sudah mempertimbangkan volume kebutuhan dan persebaran yang didasarkan pada rasio perbandingan jumlah klien dan ketersediaan perkara dengan kebutuhan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yaitu dengan nilai 83.51%. Sedangkan persebaran Pembimbing Kemasyarakatan yaitu Tingkat Pertama sebanyak 15 orang; Pembimbing Kemasyarakatan Tingkat Muda sebanyak 47 orang dan untuk Pembimbing Kemasyarakatan Tingkat Madya sebanyak 5 orang.

Kata kunci: balai pemasyarakatan; pembimbing kemasyarakatan; penelitian kemasyarakatan.

Victorio H. Situmorang (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)

Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 13, Nomor 1, Maret 2019

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 3 yang tertulis "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lalu dalam pasal 1 angka 2 yang tertulis "Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab". Berdasarkan aturan di atas, penelitian ini ingin menyampaikan bahwa Pemasyarakatan adalah bagian dari sistem hukum di Indonesia, yang perlu mendapatkan perhatian besar dari pemerintahan Republik Indonesia. Adapun metodologi penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, sifat penelitian adalah deskriptif dengan sumber data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem Pemasyarakatan yang berjalan saat ini, masih memiliki banyak kekurangan di berbagai sisi. Baik dari sisi sumber daya manusia maupun dari sisi sarana prasarana. Perbandingan jumlah yang tidak ideal antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan petugas Pemasyarakatan merupakan salah satu kondisi yang bisa dikategorikan suatu hambatan dalam terselenggaranya sistem Pemasyarakatan yang ideal. Yang mana tentunya juga menjadi kendala dalam penegakan hukum di Indonesia

Kata kunci: lembaga pemasyarakatan; sumber daya manusia; penegakan hukum.

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

Duwi Handoko (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda)

Politik Hukum Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 13, Nomor 1, Maret 2019

Substansi Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, meliputi aspek hukum privat dan hukum publik. Dalam tulisan ini, hanya dikaji unsur hukum publik, khususnya terkait kriminalisasi dan dekriminialisasi. Penelitian ini dilandasi oleh keingintahuan dalam mengungkap dasar pemikiran kriminalisasi dan dekriminialisasi untuk mencapai tujuan, yaitu setiap orang harus mengetahui batasan-batasan terhadap suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif dengan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan. Kriminalisasi dan dekriminialisasi di bidang hak cipta adalah bagian dari Politik Hukum Pidana Indonesia. Dasar pemikiran proses kriminalisasi dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu kriminalisasi murni dan bukan kriminalisasi murni. Dasar pemikiran proses dekriminialisasi adalah pidana tidak dijatuhkan atas perbuatan pelanggaran hak cipta yang tidak memiliki kepentingan secara komersial. Pemerintah hendaknya secara terus menerus memberikan edukasi kepada pencipta atau pemegang hak cipta dalam menyikapi delik aduan di bidang hak cipta. Pencipta hendaknya terus berkarya dan memahami bahwa tidak semua pelanggaran hak cipta dapat dinyatakan sebagai kejahatan dan terhadap pelakunya disebut penjahat. Hal itu karena ada legalisasi terhadap pelanggaran itu sendiri.

Kata kunci: hak cipta; politik hukum; hukum pidana; kriminalisasi; dekriminialisasi.